



FAKTOR SERTA UPAYA PENCEGAHAN KERUSUHAN DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN INDONESIA MELALUI KOMUNIKASI

Ni Putu Pratigrahitia Pratiwi, Ali Muhammad, Herry F Butar Butar
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Pemasarakatan sebagai subsistem terakhir dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia memiliki peran Lembaga pelaksana hukuman pidana penjara di Indonesia. Oleh karena keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia maka tidak jarang pula terjadi konflik dalam penjara yang mengakibatkan tragedi kemanusiaan seperti kerusuhan. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kerusuhan dalam Lapas dan bagaimana upaya komunikasi yang efektif dalam mencegah terjadinya kerusuhan tersebut. Penelitian menggunakan metode studi literatur dimana data bersumber pada buku, jurnal, serta pustaka lain yang relevan dengan pembahasan. Data disajikan secara deskriptif. Dalam penelitian ditemukan bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya kerusuhan adalah keadaan lapas yang overcapacity, perbandingan petugas lapas dan narapidana yang tidak ideal, serta situasi monoton yang menimbulkan stress. Selain itu ditemukan peran penting komunikasi antara petugas dan narapidana dalam mencegah terjadinya kerusuhan dalam lapas.

Kata Kunci : Pemasarakatan, Komunikasi, dan Kerusuhan.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan keberagaman suku, budaya, agama bahkan bahasa. Indonesia memiliki 718 bahasa daerah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Bahasa Indonesia hadir sebagai sarana komunikasi masyarakat untuk melakukan interaksi ditengah keberagaman yang dimiliki Indonesia. Komunikasi berperan penting dalam hamper disegala bidang kehidupan. Komunikasi yang awalnya hanya terdapat pada masyarakat kecil berkembang hingga menjadi penghubung antar individu di segala ruang lingkup bermasyarakat.

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi kepada individu lain sehingga, makna yang ingin disampaikan oleh komunikator kepada komunikan tersampaikan dengan baik. Komunikasi dapat dilakukan dengan contoh kecil berbicara. Namun, tidak semua individu paham bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan benar.

Komunikasi yang baik dan benar dapat dibuktikan dengan tersampainya informasi kepada individu tujuannya sesuai makna informasi tersebut.

Ditengah keberagaman yang dimiliki Indonesia, perlu dibangun hubungan yang harmonis antar sesama. Hal yang terjadi apabila komunikasi tidak berjalan dengan baik dan benar adalah kemungkinan atas munculnya konflik. Hal itu terjadi karena tidak adanya komunikasi yang dilakukan anggota masyarakat sehingga komunikasi tidak dapat menjalankan perannya sebagai sarana yang dapat meminimalisir munculnya konflik yang ada dalam kehidupan sehari-hari.

Konflik merupakan salah satu gesekan yang muncul akibat dari adanya dua pihak atau lebih yang tidak dapat menyelesaikan masalah dengan komunikasi yang baik. Oleh karena itu, maka bukan tidak mungkin ditengah keberagaman yang dimiliki Indonesia muncul konflik dalam setiap lingkup masyarakat.

Beberapa bulan terakhir, konflik yang terjadi di masyarakat jumlahnya semakin meningkat. Dari masyarakat dengan individu berjumlah banyak hingga sedikit sekalipun. Seolah konflik datang tidak berhenti. Pemasyarakatan sebagai contoh kelompok masyarakat karena didalamnya sebagai tempat hidup dan berkembangnya individu juga tidak luput dari berbagai konflik. Peristiwa seperti ini mudah saja diketahui oleh masyarakat luas melalui berbagai berita di media komunikasi. Beberapa peristiwa seperti pelarian narapidana, kekerasan, hingga kerusakan menjadi tidak asing didengar dan diketahui oleh masyarakat.

Pemasyarakatan merupakan subsistem terakhir yang ada dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Posisi terakhir ini menunjukkan bahwa pemasyarakatan berkedudukan sebagai lembaga pelaksana hukuman pidana penjara di Indonesia yang dilaksanakan melalui Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jendral Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Lembaga Pemasyarakatan atau yang disebut LAPAS (Undang Undang No. 12 Tahun 1995 pasal 1 Ayat 3) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Lapas merupakan salah satu bagian dari UPT yang dimiliki Pemasyarakatan.

Perkembangan Lembaga Pemasyarakatan dewasa ini mengalami beberapa kendala dimana salah satunya yang dapat terjadi pada hampir seluruh Lembaga Pemasyarakatan yang ada di seluruh Indonesia yaitu kondisi kepadatan penghuni (narapidana). Kondisi ini menunjukkan perbandingan atas kapasitas yang seharusnya diisi oleh suatu Lembaga Pemasyarakatan dengan jumlah kepadatan yang mengisi Lembaga Pemasyarakatan.

Dengan adanya kondisi seperti itu maka akan sangat rentan muncul berbagai tragedi lain akibat semakin banyaknya individu yang memiliki berbagai pemikiran, sudut pandang, juga kepentingan yang hidup secara bersama-sama di dalam Lembaga Pemasyarakatan seluruh Indonesia.

Berbagai tragedi yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan lebih layak disebut sebagai tragedi kemanusiaan yang mencekam juga meresahkan masyarakat luar sebagai individu yang tidak mengetahui kondisi Lembaga Pemasyarakatan di dalamnya. Tragedi tersebut seperti pelarian diri, kerusakan, bentrokan, hingga kebakaran menunjukkan minimnya fasilitas pendukung kegiatan pembinaan untuk narapidana juga anak didik pemasyarakatan.

Tragedi mengenai kerusakan yang terjadi berbagai Lembaga Pemasyarakatan seluruh Indonesia menunjukkan rentannya gesekan yang dapat terjadi ditengah kepadatan penghuni Lapas di Indonesia. Dampak dari adanya tragedi ini dari luka-luka yang dialami baik narapidana hingga petugas pemasyarakatan bahkan sampai jatuhnya korban kematian menambah kecemasan yang dirasakan oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai tempat pembinaan narapidana belum dapat diwujudkan secara penuh dilihat dari masih adanya tragedi-tragedi yang dialami Lapas itu sendiri. Oleh karena itu, maka dalam penelitian ini penulis mencoba menganalisis dan mencari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan dalam Lapas.

Setelah menemukan faktor-faktor penyebab terjadinya kerusakan tersebut maka, dapat diketahui bagaimana peran komunikasi yang dilakukan antara penghuni dalam hal ini narapidana dengan petugas pemasyarakatan sebagai upaya pencegahan terjadinya kerusakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Dengan uraian tersebut diatas maka penulis ingin melakukan penelitian membahas pertanyaan mengenai apa yang menjadi faktor penyebab kerusakan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) serta bagaimana peran komunikasi sebagai upaya pencegahan kerusakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam mengefektifkan langkah-langkah yang akan diambil maka penelitian ilmiah memerlukan teknik penyusunan yang sistematis untuk. Oleh karena itu, hal yang sama dilakukan penulis dalam penelitian ini. Namun karena keadaan yang sedang tidak memungkinkan untuk melakukan penelitian dengan terjun secara langsung ke lapangan oleh karena pandemik COVID-19 yang sedang menyelimuti hampir seluruh belahan dunia, maka peneliti terbatas menggunakan metode penelitian studi literatur.

Penelitian yang dilakukan berdasarkan atas karya tulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan merupakan penelitian dengan menggunakan metode studi literatur (Embun, 2012). Sumber literatur yang digunakan penulis dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan serta penelitian lain yang membahas hal yang relevan.

Studi literatur dipilih menjadi metode dalam penelitian ini mempertimbangkan pandemik COVID-19 yang mengharuskan peneliti untuk melakukan penelitian dengan tidak turun ke lapangan serta tidak bertemu dengan responden. Sehingga, data diperoleh dari sumber pustaka atau dokumen.

Seperti penelitian pada umumnya persiapan yang dilakukan sama akan tetapi, sumber dan metode pengumpulan data dilakukan dengan mengambil data di pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. Hasil data yang diperoleh disajikan secara deskriptif agar pembaca dapat mengetahui dan memahami hasil penelitian yang telah dilakukan.

PEMBAHASAN

Dalam melakukan penelitian, penulis menemukan beberapa teori yang akan digunakan dalam membahas pertanyaan diatas. Teori merupakan landasan atau pandangan yang digunakan untuk mencapai hala tuju dan mencapai rangka kerja suatu masalah yang hendak dituntaskan. Melalui penelitian ini akan dimuat beberapa teori yang berkenaan

dengan peran komunikasi dengan adanya konflik yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.

1. Teori Kerusuhan Massa

Teori ini dikemukakan oleh seorang sosiolog Amerika bernama Neil Joseph Smelser (1930-2017). Teori ini muncul sebagai pelengkap atas Teori Deprivasi Relatif yang tidak menyertakan tahapan-tahapan munculnya kekerasan atau konflik. Menurut Smelser, terdapat lima tahapan munculnya kekerasan atau kerusuhan massa. Dimana setiap tahapan tersebut berlangsung secara kronologikal. Lima tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Situasi Sosial

Adanya situasi sosial memungkinkan timbul kerusuhan akibat adanya struktur sosial tertentu Hal ini dapat diakibatkan oleh tidak ada penyalur rasa ketidakpuasan atau kejengkelan dan sarana untuk saling berkomunikasi. Seperti dalam sebuah pertandingan sepak bola dimana masing-masing tim memiliki pendukung atau supporter yang berada diluar kendali sistem yang ada. Mereka datang membawa serta prasangka buruk terhadap tim lawan dan pendukung lawannya tersebut.

b. Tekanan Sosial

Oleh karena jumlah anggota masyarakat yang banyak sehingga terdapat nilai dan norma yang mulai dilanggar. Seperti contoh dalam pertandingan sepak bola diatas, kejengkelan pendukung tim A karena pendukung lawan menggunakan kata-kata kasar dan memaki sehingga memunculkan kerusuhan sebagai respon agresifitas terhadap perilaku pendukung tersebut.

c. Berkembang Prasangka Kebencian

Prasangka kebencian ini biasanya diarahkan atau memiliki suatu sasaran tertentu. Sasaran dalam hal ini dapat berupa subyek maupun obyek. Contoh sasaran dalam kasus permainan sepak bola tersebut adalah pemerintah. Sasaran ini memiliki keterkaitan dengan faktor pencetus yang memicu suatu kerusuhan. Sindiran dan makian seperti tersebut diatas akhirnya dibalas dengan aksi saling melempar botol hingga merusak fasilitas stadion tempat pertandingan.

d. Mobilisasi Massa Aksi

Pada tahap ini terdapat pergerakan massa sebagai bentuk nyata suatu kerusuhan yang ditujukan langsung kepada sasaran tujuan. Dalam contoh diatas maka pergerakan massa akan mengorganisasikan diri untuk bergerak melawan tim pendukung lawan juga berdampak pada pihak lain seperti aparat kepolisian, panitia pertandingan, hingga fasilitas stadion.

e. Kontrol Sosial

Dalam meredam kerusuhan yang telah terjadi maka akan sangat penting peran aparat keamanan dalam mengendalikan situasi dan menghambat kerusuhan. Tahap ini berlawanan dengan tahapan sebelumnya. Kontrol sosial dalam tahap ini jika dilihat dari contoh diatas dilakukan oleh polisi, panitia keamanan pertandingan, serta pihak keamanan terkait untuk meredakan kerusuhan.

2. Teori Negosiasi

Negosiasi merupakan salah satu teori komunikasi yang digunakan untuk mengelola atau menangani konflik yang terdapat dalam berbagai bidang serta konteks komunikasi baik komunikasi interpersonal, komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi antar budaya, komunikasi lintas budaya, komunikasi bisnis, dan komunikasi internasional (Stephen, PR, 2017). Negosiasi juga merupakan salah satu manajemen konflik selain mediasi dan dialog antar pihak-pihak yang memiliki konflik. Teori ini lebih menekankan adanya pertukaran ide, gagasan, pendapat, dan usulan yang bertujuan untuk meminimalisir perbedaan dampak yang terjadi akibat ketidaksesuaian tujuan masing-masing pihak.

Penerapan teori ini umumnya, dapat ditemui dalam segala bidang kehidupan. Seperti misalnya proses jual beli pada sebuah pasar, perjanjian bisnis atau ekonomi, situasi-situasi khusus seperti penyanderaan, kerusakan, kekerasan, dan lain-lain. Oleh karena itu, teori ini perlu oleh seluruh elemen masyarakat mengingat teori ini memegang peranan penting bagi setiap individu untuk memperoleh pemahaman bagaimana menentukan kebijakan atau keputusan sebagai langkah penanganan permasalahan yang kompleks dengan faktor-faktor perubahan perilaku manusia yang memiliki tujuan yang berbeda.

Teori negosiasi adalah suatu bentuk pendekatan yang komunikatif melalui berbagai pesan, symbol, dan bahasa dalam perannya sebagai alat komunikasi yang digunakan sebagai sarana pertukaran ide atau usulan yang dapat mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Teori ini dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan.

Linda L. Putnam seorang sarjana Amerika juga professor di Departemen Komunikasi Universitas Santa Barbara, California menyatakan terdapat dua pendekatan umum yang digunakan dalam melakukan negosiasi yaitu:

a. Distributive Bargaining

Tawar-menawar distributive memiliki ciri dimana menciptakan keuntungan bagi hanya pada pihak sendiri. Sebesar mungkin negosiasi menunjukkan hasil apapun yang didapat adalah dengan mengorbankan kepentingan pihak lawan.

b. Integrative Bargaining

Pendekatan ini berlawanan dengan pendekatan sebelumnya. Ciri utama dalam tawar-menawar integrative adalah keuntungan negosiasi diperoleh oleh semua pihak. Negosiasi dilakukan dengan menciptakan win-win solution atau hasil yang diperoleh menguntungkan semua pihak yang bernegosiasi. Selain itu, negosiasi dengan pendekatan integratif memungkinkan terjalinnya hubungan jangka panjang bagi semua pihak serta dapat meminimalisir muncul konflik karena arah kepentingan yang selaras.

Selain beberapa teori di atas, adapun definisi yang dapat menunjang pembahasan.

1. Kerusuhan Massa

Massa merupakan sekelompok orang yang berkumpul dalam jumlah banyak, memiliki anggota yang bersifat heterogen, serta memiliki kesadaran diri yang rendah. Sedangkan, kerusuhan adalah tindakan bersama oleh sekelompok individu yang dilakukan dengan tujuan bersama dengan menimbulkan situasi mencekam dan berbahaya bagi ketertiban umum. Kerusuhan juga biasanya disertai dengan penggunaan kekerasan, senjata

tajam, hingga mengakibatkan kerusakan fasilitas umum seperti jalan, tembok, dan lain sebagainya.

Kerusuhan massa merupakan suatu situasi kacau yang dilakukan sekelompok individu dengan pergerakan secara masal yang mengakibatkan kondusifitas umum terganggu. Kerusuhan massa karena menyebabkan terganggunya ketertiban umum maka digolongkan pada konflik sosial. Konflik terjadi karena adanya pendapat yang tidak sesuai antar pihak satu dengan pihak lainnya yang berpengaruh pada tegangan kondusifitas situasi antar pihak.

Dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dalam pasal 1 ayat (1): "Konflik sosial, yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/ atau benturan fisik dengan kekerasan antar dua kelompok masyarakat dan/ atau lebih yang berlangsung dalam kurun waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional."

Kerusuhan diawali dengan berkobarnya rasa kebencian dan dendam yang berdampak negatif pada terjadinya hambatan kemajuan masyarakat dan kondisi disitegrasi sosial yang menghambat pembangunan (Sugeng B, 2011).

Penyelesaian kerusuhan selama ini dilakukan dengan adat berupa mediasi pihak-pihak yang mengalami selisih paham dan dengan menempuh jalur hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Komunikasi

Komunikasi adalah inti dari semua hubungan sosial yang digunakan sebagai pemenuh rasa ingin tahu yang dimiliki manusia sebagai makhluk individu. Dapat disadari ataupun tidak komunikasi telah dilakukan oleh manusia setiap hari, karena komunikasi adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses berjalannya kehidupan. Keakraban yang tercipta ditengah keberagaman masyarakat dapat dikatakan dapat terjadi karena adanya komunikasi.

James Stoner mendefinisikan komunikasi sebagai sebuah akses dimana didalamnya terdapat seseorang yang berusaha memberikan pengertian yang bisa dilakukan dengan cara pemindahan sebuah pesan. Menurut William I. Gordon komunikasi dapat diartikan sebagai salah satu transaksi yang dinamis yang didalamnya terdapat komunikator dan komunikan sehingga melibatkan gagasan dan perasaan.

Komunikasi yang dalam bahasa inggris disebut communication dapat mengubah pikiran hingga sudut pandang orang lain sehingga dapat melaksanakan apa yang dimaksudkan oleh komunikator. Secara garis besar maka komunikasi dapat diartikan sebagai penyampaian informasi dan pengertian. Informasi hasil dari pengolahan atas stimulus yang selanjutnya masuk dalam otak untuk diolah dengan pengetahuan yang dimiliki individu tersebut (Wiryanto, 2004).

Tujuan dari komunikasi yaitu dapat terwujudnya perubahan sifat, opini, sudut pandang, atau pendapat seseorang sesuai dengan tujuan penyampaian atau maksud komunikator. Sesuai dengan fungsi komunikasi yang bersifat persuasif (dapat mengajak), edukatif, dan informatif sehingga perannya sangat penting bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dalam setiap melakukan komunikasi harus terdapat unsur-unsur

kesamaan makna agar pertukaran pikiran atau pengertian antar komunikator dengan komunikan dapat terjadi.

Menurut Lasswell terdapat metode untuk menjelaskan komunikasi yaitu dengan menjawab pertanyaan yaitu:

- a. *Who* menjawab pertanyaan mengenai siapa yang menyampaikan atau siapa yang dimaksud sehingga jawaban dapat berupa nama orang, komunikator, dan sumber.
- b. *What* menjawab pertanyaan atas apa yang ingin disampaikan. Jawaban dapat berupa isi pesan, ide, dan gagasan.
- c. *in Which* yang menjawab mengenai dengan saluran mana informasi tersebut dilakukan. Jawaban atas pertanyaan ini merujuk pada media atau saluran yang digunakan.
- d. *to Whom* yaitu kepada siapa komunikasi ditujukan, merujuk kepada komunikan atau penerima informasi.
- e. *with What* yang menjawab mengenai efek atau hasil yang ditimbulkan akibat terjadinya komunikasi.

Melalui padangan Lasswell mengenai komunikasi tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan proses penyampaian ide, gagasan, pendapat dari komunikator kepada komunikan dengan menggunakan suatu media atau saluran serta menghasilkan efek tertentu.

Melalui beberapa teori dan definisi tersebut diatas maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab kerusuhan dalam Lapas

Kedudukan Pemasarakatan sebagai subsistem terakhir dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia menjadikan Lapas sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan pidana bagi pelaku tindak pidana. Pelaksanaan hukuman pidana yang dilakukan dapat menimbulkan dampak berupa kerusuhan yang disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

a. Kondisi Kepadatan Dalam Lapas

Faktor mendasar yang menjadi penyebab timbulnya kerusuhan dalam Lapas sendiri adalah kondisi kelebihan hunian (*overcapacity*) narapidana dalam Lembaga Pemasarakatan di hampir seluruh Indonesia. Dari total jumlah Lapas dan Rutan seluruh Indonesia yang mencapai 528 Unit Pelaksana Teknis memiliki kapasitas sebesar 130.512 orang. Hingga Desember 2019, UPT tersebut diisi dengan jumlah penghuni sebanyak 269.846 orang, sehingga terdapat kelebihan kepadatan penghuni sebesar 107%.

Jumlah tersebut sangat tidak ideal dan jelas menimbulkan ketidaknyamanan bagi penghuni didalamnya. Narapidana yang berada dalam Lapas mengalami ketidakpuasan akan kondisi tersebut sehingga mudah muncul percikan emosi akibat bersinggungan kepentingan antar narapidana sehingga berpotensi menciptakan kerusuhan di dalam Lapas.

Fenomena seperti ini kerap kali menimbulkan suatu proses pembinaan narapidana dalam Lapas yang kurang kondusif. Sehingga tidak dapat bermuara pada tujuan awal pembinaan yaitu efektifnya program reintegrasi sosial. Segala keterbatasan tersebut berdampak pada kondisi dimana narapidana tidak cukup siap untuk kembali kepada masyarakat ketika selesai menjalani pidana penjara.

b. Petugas Pemasyarakatan

Perlu diingat bahwa Lembaga Pemasyarakatan bukan hanya dihuni oleh narapidana yang sedang menjalani pidana penjara namun juga dihuni oleh petugas pemasyarakatan. Petugas Pemasyarakatan dalam UU Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 merupakan Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas dibidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Perbandingan jumlah petugas pemasyarakatan dengan jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia menunjukkan ketimpangan yang menyebabkan munculnya kondisi tidak ideal dalam Lapas. Rata-rata satu orang petugas pemasyarakatan mengawasi sekitar tiga puluh empat orang narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan. Jika dibandingkan dengan Australia dimana 1 sipir mengawasi 2 narapidana, di Brunei Darussalam 1 sipir mengawasi 1 narapidana, dan di China 1 sipir mengawasi 3-4 orang narapidana.

Dengan jumlah petugas pemasyarakatan yang sedikit tersebut, pihak Lapas juga harus membagi petugas menjadi 3-4 regu pengamanan dalam sehari. Sehingga kekurangan jumlah personel petugas pengamanan Lapas kerap menimbulkan lemahnya penanganan gesekan konflik yang memicu kerusuhan dalam Lapas. Hal tersebut juga mengakibatkan pembinaan terhadap narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak dapat dilakukan secara maksimal.

Menjadi petugas Lapas adalah seperti menjadi manusia super. Selain dituntut bertanggung jawab, memahami tugas dan fungsinya, dan profesional dalam bekerja juga memiliki resiko tinggi terhadap kemungkinan menjadi korban dalam suatu tragedi kerusuhan tersebut. Suasana yang siap siaga dan penuh kewaspadaan setiap saat sewaktu bekerja tidak sebanding dengan kesejahteraan yang didapat oleh petugas Lapas.

Bahkan, karena sehari-hari selalu berhadapan dengan orang-orang yang dianggap sesat atau sakit karena memiliki riwayat tindak pidana atau penyimpangan sosial, tidak jarang petugas Lapas kurang mendapat penghargaan atas kerja kerasnya di tengah-tengah masyarakat.

c. Situasi Lapas

Hidup dan menjalani masa pidana di balik jeruji besi adalah hal yang tidak diinginkan oleh seluruh individu. Begitu pula bagi narapidana yang ada didalamnya. Mereka terpaksa menjalani hilangnya kebebasan mereka untuk sementara karena melakukan tindak pidana, terbukti, dan telah divonis dengan kekuatan hukum tetap tentunya. Hal ini menyebabkan situasi yang terjadi di dalam Lapas menjadi mengerikan karena diisi oleh individu bermasalah. Maka tak heran Lapas disebut sebagai sekolah tinggi kejahatan.

Peraturan-peraturan yang diterapkan dalam Lembaga Pemasyarakatan yang bersifat mengekang karena mengutamakan ketertiban dan keamanan dirasakan narapidana sebagai tambahan kesakitan. Disiplin dianggap sebagai penderitaan hingga tata kehidupan yang berlangsung berulang-ulang setiap harinya (bahkan terkesan monoton) dianggap sebagai kemajemukan. Situasi seperti itu berlangsung dalam kurun waktu yang tidak singkat mengakibatkan rasa bosan bahkan memicu stress atau depresi yang berkepanjangan.

Hal ini sesuai dengan Teori Kerusuhan Massa milik N.J Smelser yang menurutnya kerusuhan terjadi melalui lima tahapan yang berlangsung secara kronologikal. Dimulai dari

adanya situasi sosial yang dapat memicu munculnya kerusuhan, adanya tekanan sosial atas situasi yang dialami, berkembangnya prasangka kebencian terhadap suatu subyek, adanya pengerahan massa untuk beraksi, serta diakhiri dengan tidak adanya kontrol sosial sehingga kerusuhan tidak dapat dihindarkan.

Dalam Lapas, situasi yang monoton tersebut menimbulkan tekanan baik bersumber dari rasa stress yang berasal dari dalam individu maupun stigma masyarakat atas label narapidana yang melekat dalam individu tersebut lantas menimbulkan prasangka kebencian yang berkembang terhadap suatu sasaran tertentu seperti kebencian terhadap petugas pengamanan yang secara 24jam mengawasi mereka. Kebencian ini timbul karena adanya keinginan narapidana untuk mendapatkan kelonggaran dan keinginan petugas yang berlawanan yaitu menciptakan situasi aman terkendali menjadikan keinginan melakukan kerusuhan semakin meningkat.

Selanjutnya akan timbul proses mobilisasi massa dimana munculnya tindakan nyata dan adanya pengorganisasian massa untuk bergerak melakukan pemberontakan yang menjadi tahap akhir yaitu pecahnya kerusuhan sehingga peran petugas sebagai pengendali dan pereda atas kerusuhan sangat diperlukan.

2. Peran Komunikasi Antar Petugas Dan Narapidana Sebagai Upaya Pencegah Kerusuhan Dalam Lapas.dst.

Setelah ditemukan faktor-faktor penyebab timbulnya kerusuhan yang terjadi dalam Lembaga Pemasyarakatan seperti tersebut diatas maka dianggap penting untuk melakukan upaya-upaya pencegahan atas kemungkinan munculnya peristiwa seperti itu dalam Lapas di seluruh Indonesia.

Upaya tersebut baik berupa upaya preventif maupun represif. Upaya preventif adalah upaya penanggulangan kemungkinan timbulnya kerusuhan agar sedini mungkin kerusuhan dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat dicegah antara lain dengan; (1) melakukan penyuluhan hukum yang bertujuan memberikan kesadaran hukum terhadap narapidana atas tindakan yang telah dilakukan sehingga mereka dapat bertindak sesuai hukum yang berlaku. (2) mengefektifkan pidana lain selain pidana penjara yang dilakukan melalui pertimbangan keputusan hakim, menimbang keadaan Lembaga Pemasyarakatan yang berpenghuni lebih dari kapasitas yang seharusnya. (3) ketepatan sasaran program pembinaan yang dilakukan narapidana dalam Lapas seperti program layanan kunjungan, penempatan narapidana sesuai kebutuhan keamanan, pemberian remisi, perawatan dan pemeliharaan kesehatan dalam Lapas, hingga pekerjaan yang dilakukan dalam Lapas sehingga pikiran atau ide untuk melakukan tindakan yang merugikan seperti kerusuhan dapat dialihkan.

Selanjutnya adalah upaya represif yang dilakukan saat terjadinya kerusuhan dalam Lembaga Pemasyarakatan. Upaya represif dapat dilakukan seperti; (1) peran penting petugas pemasyarakatan dengan dwi fungsi yaitu sebagai pembina dan mampu mengambil tindakan dalam mengatasi kerusuhan, (2) terjalinnya kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya akan sangat membantu apabila terjadi kerusuhan dalam Lapas sehingga peristiwa tersebut dapat segera diatasi.

Melihat adanya peran penting atas adanya hubungan antar petugas dan narapidana yang menjadi penghuni di dalam Lembaga Pemasyarakatan maka perlu dihadirkan komunikasi yang baik antara kedua pihak tersebut. Diperlukan adanya suatu pendekatan

yang diharapkan mampu mencegah peristiwa kerusuhan yang mungkin terjadi di dalam Lapas.

Oleh karena itu, komunikasi dapat dihadirkan melalui pendekatan tukar menukar integratif sesuai teori negosiasi. Lembaga Pemasyarakatan yang terdiri atas petugas pemasyarakatan yang bekerja dengan tujuan memastikan keamanan dan ketertiban dalam Lapas dan narapidana sebagai penghuni yang menerima pelayanan dan hak-hak yang diperoleh sesuai ketentuan perundang-undangan.

Menurut penulis, peran komunikasi disini ialah menciptakan win win solution dimana terjalin hubungan antara pihak petugas dan narapidana yang berlangsung dalam jangka panjang. Hubungan tersebut dijalin melalui komunikasi secara intens antar petugas dan narapidana. Terjadi pertukaran usul dimana saat petugas menginginkan kondisi Lapas yang aman, tertib, dan terkendali maka pihak narapidana dapat memenuhi al tersebut sehingga petugas kembali memberikan pelayanan yang baik serta pemenuhan hak-hak narapidana sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 14 ayat (1) yaitu: "Narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun perawatan jasmani
- c. Mendapat pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi)
- j. Mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. Mendapat pembebasan bersyarat
- l. Mendapat cuti menjelang bebas, dan
- m. Mendapat hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Komunikasi juga digunakan oleh narapidana untuk menunjukan usulan demi keberlangsungan ketertiban dan keamanan Lapas. Jika komunikasi yang terjalin antar petugas dan narapidana dapat dilakukan dengan baik maka akan dapat meminimalisir celah munculnya konflik yang dapat merugikan kedua belah pihak. Ini menunjukkan adanya keselarasan tujuan antar petugas dan narapidana sehingga langkah yang diambil bertujuan atas keuntungan bersama.

Komunikasi dalam hal ini menunjukkan perannya sebagai sarana yang dapat meredam dan meminimalisir konflik. Ditengah keberagaman yang terdapat di dalam Lapas karena narapidana yang tinggal memiliki latar belakang budaya, suku, daerah, dan bahasa yang berbeda. Namun, dengan adanya komunikasi yang terjalin dengan baik maka dapat menghindari terjadinya konflik yang dapat memicu terciptanya kerusuhan dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Komunikasi dapat dibangun perlahan mulai dari hal-hal kecil bertegur sapa dengan narapidana, memberikan dan pelayanan yang humanis kepada narapidana. Harapannya

agar narapidana juga dapat perlahan menyadari kesalahan yang telah dilakukannya dimasa lampau, lalu dapat mengubah diri menjadi pribadi yang lebih baik dengan mengikuti arahan petugas sehingga dapat mengikuti program pembinaan yang bertujuan pada kesiapan narapidana tersebut untuk kembali ke masyarakat.

PENUTUP

Perlu diketahui terdapat faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kerusuhan antara lain: (1) adanya kelebihan kepadatan jumlah narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan di hampir seluruh Indonesia yang mencapai 107%, (2) terjadinya ketimpangan perbandingan antara jumlah petugas pemasyarakatan dengan jumlah narapidana yang menjadi tanggung jawab dalam Lapas yang menunjukkan tidak idealnya dimana satu petugas mengawasi sekitar tiga puluh empat orang narapidana, selain itu peran petugas pemasyarakatan juga kurang mendapat penghargaan ditengah masyarakat, (3) situasi yang tercipta dalam Lapas kurang kondusif mengingat keadaan individu yang masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan secara terpaksa (sebagai hukuman) dan kegiatan yang monoton menimbulkan stress dan depresi sehingga muncul berbagai keinginan untuk melakukan kerusuhan agar dapat melarikan diri.

Setelah mengetahui faktor penyebab kerusuhan maka dipandang perlu untuk melakukan komunikasi antar petugas pemasyarakatan dan narapidana yang secara bersama-sama bekerja dan berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Komunikasi disini berperan sebagai sarana yang dapat meminimalisir konflik sehingga dapat memperkecil kemungkinan timbul gesekan, konflik yang berujung pada terciptanya kerusuhan dalam Lapas.

Hasil penelitian dengan metode studi literatur ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat bagi pihak-pihak terkait. Diharapkan dengan hadirnya penelitian ini maka pihak-pihak terkait dapat memperkecil kemungkinan terjadinya kerusuhan dalam Lapas. Pemahaman mengenai tugas dan fungsi petugas pemasyarakatan diharapkan dapat diinternalisasikan dengan baik agar selama menjalankan tugas Lapas dapat terkendali dengan aman dan tertib. Petugas pemasyarakatan perlu dibekali kompetensi teknis mengenai metode komunikasi yang efektif dan humanis dalam menciptakan situasi kerja yang kondusif.

DAFTAR BACAAN

Amin, M.A.S. (2017). Komunikasi Sebagai Penyebab Dan Solusi Konflik Sosial. *Jurnal Common*, Vol. 1 No. 2, 101-108.

Aswar dan Patriani, PN. (2018). Hubungan Komunikasi Organisasi Dengan Konflik Kerja Pada Perusahaan PT. Kimia Farma, Tbk. Cabang Makassar. *Jurnal Komunikasi Global*, Vol 7 No. 2, 136-147.

Citrawan, H dan Zainuddin, D. (2015). Metode Analisis Konflik Dalam Penerapan Regulasi Pencegahan Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12 No. 1, 1-33.

Heridiansyarh, J. (2014). Manajemen Konflik Dalam Sebuah Organisasi. *Jurnal STIE Semarang*, Volume 6 Nomor 1, 28-41.

- Hutabarat, R.R. (2017). Problematika Lembaga Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol. 1 No. 1, 42-50.
- Ismail R. (2013). Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 2 Nomor 2, 263-276.
- Mulyono, G.P dan Arief, B.N. (2016). Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia. *Jurnal Law Reform*, Volume 12 Nomor 1, 1-16.
- Mustofa, M. (2000). Memahami Kerusakan Sosial, Suatu Kendala Menuju Masyarakat Madani. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 1 No. 1, 10-19.
- Situmorang, V.H. (2018). Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum (Correctional Institution as Part of Law Enforcement). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 13 No. 1, 85-98.
- Sosiawan, U.M. (2017). Upaya Penanggulangan Kerusakan Di Lembaga Pemasyarakatan (The Countermeasure Efforts of Riots at the Corretional Institutions). *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Volume 17 Nomor 3, 365-379.
- Hamzah, A. (1993). Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudarto. (2010). Kapita Selekta Hukum Pidana Edisi 1 Cetakan Ke-empat. Bandung: PT. Alumni, 2010.
- Sugeng, B. (2011). Penanganan Konflik Sosial. Bandung: BPHN.
- Robbins P.S. Timothy A.J. (2017). Perilaku Organisasi. Jakarta: Salemba Empat Cetakan Kelima.
- Wiryanto. (2004). Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: Grasindo.
- Ambar. (2017). Model Komunikasi Lasswell-Konsep-Kelebihan-Kekurangan. Juni 2017. <https://workamerica.co/pengertian-komunikasi/>
- Andi Saputra. (2018). 5 Fakta Mengejutkan Lapas Di Indonesia. Desember 2018. <https://news.detik.com/berita/d-4365019/5-fakta-mengejutkan-lapas-di-indonesia>
- Kaki S. (2020). Pengertian Komunikasi Menurut Para Ahli. Januari 2020. <https://workamerica.co/pengertian-komunikasi/>
- Sridianti. (2018). Teori Kerusakan Massa oleh NJ Smelser. Juni 2018. <https://www.sridianti.com/teori-kerusakan-massa-oleh-n-j-smelser.html>
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (1995). Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Th. 1995 Tentang Pemasyarakatan. Jakarta, DKI: Penulis. Diakses Dari <http://www.bphn.go.id/data/documents/95uu012.pdf>
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2012). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial. Jakarta, DKI: Penulis. Diakses Dari [https://www.komnasham.go.id/files/1565071914uu-no-7-tahun-2012-\\$YGQ.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1565071914uu-no-7-tahun-2012-$YGQ.pdf)